

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Dinas Kesehatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 26 Januari 2024

Plt.KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Intan Novia Fatma Nanda, S.E., AK., MPP, M.AP
Pembina / IV a
NIP.19841111 200902 2008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

1

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KESEHATAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

2.2 Kebijakan Strategis

2.3 Tindak Lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya

3.2 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada tingkatan Pemerintahan Tingkat di bawahnya

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2023 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPj pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LKPj Bupati Pesisir Selatan Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2023, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan urusan kewenangan pembangunan kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. LKPj Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari hasil rekapitan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tiap-tiap Bidang di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, untuk itu ini adalah Laporan LKPj Operasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Sebagai gambaran capaian kemajuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu satu tahun, serta sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan LKPj Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah:

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan UPT-nya.
- c. Sebagai upaya sinergisme, sinkronisasi, dan integrasi serta koordinasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan beserta UPT nya Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait dalam berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan daerah.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 181.076.047.785,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 154.021.903.156,- atau 85,06%, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Keseha Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH.			100.076.047.785	95.324.173.060		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	77.161.500	65.102.435	sisa perjadin luar provinsi, honor narasumber, perjadin dalam	1. menyusun rencana anggaran belanja barang/jasa dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan. 2. Percepatan pelaksanaan belanja dan kegiatan sesuai dengan waktu dan target anggaran.
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	30.771.716	23.731.376	sisa perjadin	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	24.215.912	22.474.432		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dkumen	110.809.416	81.293.820	sisa honor narasumber,perjadin	
			KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			69.152.564.897	66.897.712.011		
			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan asn	orang	66.916.998.886	64.751.362.823		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	2.167.260.545	2.088.156.718		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi	laporan	33.305.463	24.431.870		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan keuangan bulanan/Trwulan/Semesteran SKPD dan	laporan	35.000.003	33.760.600		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT			107.770.001	102.022.368		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah	dokumen	87.190.001	81.671.668		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	laporan	20.580.000	20.350.700		
			KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			46.704.916	26.483.616		
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai perangkat daerah	dokumen	46.704.916	26.483.616	kegiatan sosialisasi/ birtek belum menganggarkan sewa tempat.	pada penganggaran berikutnya include sewa tempat.
			KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			662.388.052	541.100.116		
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang	paket	28.515.900	28.423.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	paket	45.008.673	44.753.700		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	29.594.799	29.450.525		
			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	dokumen	3.600.000	3.600.000		
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan	37.741.000	37.666.200		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	425.185.750	323.063.341		
			Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan asip dinamis pada SKPD	dokumen	92.741.930	74.143.350		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1			KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	377.142.319	360.566.750		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			377.142.319	360.566.750		
			KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			462.737.450	414.402.168		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	221.643.000	182.319.168		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	241.094.450	232.083.000		
			KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			600.078.300	426.003.928		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	35.000.000	21.822.400		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Iapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan periznannya	unit	309.030.300	175.413.528	1. Perbedaan nilai bayar pajak kendaraan ambulan dengan biasa. 2. Pemeliharaan kendaraan dalam bentuk paket perunit perbidang	Penghitungan RKA selanjutnya dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan dalam bentuk ambulan.
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	29.200.000	29.188.000		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	226.848.000	199.580.000		
			KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI			54.692.750	50.213.994		
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	dokumen	54.692.750	50.213.994		
			KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD			28.966.610.365.00	26.313.066.046.35		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan penunjang Pelayanan	unit	28.966.610.365.00	26.313.066.046.35	Sisa jaspel bulan desember 2023	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5	6	7	8	9	10
II.			KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM KEMEMANGKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	unit	25.772.118.379	22.518.774.333	pembangunan gedung PSC dan pengembangan Puskesmas Lumpro tidak jadi dilaksanakan karena terkendala pemilik tanah Tidak ada keputusan pasti dari pemilik lahan untuk bisa diganti rugi, sehingga Dinas Kesehatan belum bisa mengambil tidak lanjut. Dan utk tanah Puskesmas Lumpro sedang berada dalam tahap DPPT(Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) untuk dilanjutkan ke BPN dan	Diluncurkan kembali anggarannya di 2024
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang ditinggalkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah	unit	7.659.909.300	7.319.083.218		
			Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditinggalkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	unit	2.257.315.789	2.012.030.130		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	unit	4.269.021.387	4.160.368.274		
			Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket alat kesehatan yang diadakan	paket	999.087.317	907.639.480		
			Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	paket	3.777.564.960	3.250.401.981		
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	paket	4.932.892.000	4.392.345.597		
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	paket	270.430.662	150.911.953	Juknis Anggaran DAK Non Fisik(BOK) yang terlampir. Dana BOK Puskesmas, hanya 10	a. Penambahan kendaraan operasional pendistribusian obat gudang farmasi, di tahun 2024 ini dapat di dana dak fisik. Jasa ekspedisi
			Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin BM/HP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah distribusi alat kesehatan obat, vaksin, bahan habis pakai (BM/HP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	paket	234.547.308	59.940.500	Karena keterbatasan kendaraan operasional dalam pendistribusian, sebagian puskesmas ada yang menampung ke gudang farmasi dinkes sehingga penyerapan tdk maksimal. Untuk pengujian sampel makanan rencananya pengujian di BPOM padang tetapi BPOM padang sudah over maka dilakukan di labkesda sumbar yang standar biaya ditinjau oleh labkesda	
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	48.593.150.939	33.463.847.598	Juknis Anggaran DAK Non Fisik(BOK) yang terlampir. Dana BOK Puskesmas, hanya 10 puskesmas yang mendapatkan dana salur tahap 3, sehingga realisasi BOK Dinkes dan	diharapkan juknis BOK Th 2024 dapat diterima diawal tahun dari kementerian kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	2.120.762.309	1.420.051.789		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	96.330.000	75.094.750		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	60.972.000	54.173.260		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	618.147.650	312.211.324		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	536.802.720	321.348.825		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	435.792.030	190.745.344		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	290.098.802	151.961.300		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	71.115.072	63.383.600		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	487.268.798	401.067.300		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan	orang	395.658.308	459.561.906		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	1.659.790.000	162.500.390	Pengadaan Kartrid TCM senilai Rp. 1.380.200.000 di bekukan oleh kementerian kesehatan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	282.070.000	250.739.630		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	dokumen	24.890.000	6.510.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana	dokumen	46.650.000	8.920.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	6.328.745.906	755.593.197		diharapkan Jukri BOK Th 2024 dapat diterima diawal tahun dari kementerian kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	dokumen	447.949.200	192.142.387		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	637.822.800	314.471.600		
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	691.502.690	305.791.450		
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	369.680.000	118.760.850		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Perjalannya NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	82.450.000	41.650.000		
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	2.704.947.200	1.255.731.509		
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	26.124.420.138	24.865.376.788		
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah spesimen penyakit Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang didistribusikan	spesimen	287.649.642	186.254.750		
			Palaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas kesehatan yang Terakreditasi di kabupaten/kota	unit	119.038.000	52.444.000		
			Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian kuatan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian kuatan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	laporan	41.530.000	6.740.000		
			Palaksanaan Kawaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Palaksanaan Kawaspadaan Dini dan Respon Wabah	orang	25.510.000	5.530.000		
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Operasional Puskesmas	Dokumen	3.337.757.674	1.369.261.649	Juknis Anggaran DAK Non Fisik(BOK) yang terlambat. Dana BOK Puskesmas, hanya 10 puskesmas yang mendapatkan dana salur tahap 3, sehingga realisasi BOK Dinkes dan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	176.070.000	97.300.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria sesuai	orang	91.730.000	18.530.000		
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	orang	114.925.144	109.807.211		
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	114.925.144	109.807.211		
			KEGIATAN PENERBITAN IZIN RS KELAS C,D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional	unit	133.460.000	87.740.000		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		unit	133.460.000	87.740.000		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			4.013.360.679	1.531.871.564	Juknis Anggaran DAK Non Fisik(BOK) yang tertambat. Dan BOK Puskesmas, hanya 10 puskesmas yang mendapatkan dana salur tahap 3, sehingga realisasi BOK Dinkes dan	diharapkan juknis BOK Th 2024 dapat diterima diawal tahun dari kementerian kesehatan
			KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENYAGUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	orang	2.257.994.890	278.531.775		
			Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	orang	2.118.673.890	254.346.775		
			Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	139.321.000	24.185.000		Usulan BBM inklude ke dalam perjalanan Dinas untuk DAK Non Fisi
			KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIK SDM KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDMk tingkat daerah yang dilingkarkan mutu dan kompetensinya	orang	1.755.365.789	1.253.339.789	Ada beberapa kegiatan yg tidak bisa terlaksana pada sub kegiatan ini 1. Pelatihan entomolog. Kegiatan ini sudah di jadwalkan di BKOM dan Pelkes Prop. Sumatera Barat, Tetapi Fasilitator Prop baru dilatih pada akhir tahun sehingga kita dapat jadwal bulan Des yang rasanya tidak mungkin lagi mengerjakannya karena persiapan yang banyak. 2. Kala Karya MTBS. Kegiatan ini sudah dikoorord dg seksi kesga giri, tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada pengannggaran BBM untuk kelengkapan, Fasilitator MTBS MTBSM terbatas. ada beberapa kegiatan lagi yg tidak bisa dilaksanakan, orientasi penyelenggaraan labor, pelatihan kekerasan terhadap	
IV.			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMUAN			350.127.250	161.541.250	Keterbatasan SDM dalam pengawasan sarana Toko Obat, Apotek, Keterbatasan sarana operasional pengawasan	Memambah SDM dan membuat tim pengawasan sarana toko obat, apotek
			KEGIATAN PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL/UMOT	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)	dokumen	86.594.250	33.388.300		
			Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)	dokumen	86.594.250	33.388.300		
			KEGIATAN PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN IRT DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN DAN MINUMUAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH IRT			116.350.000	49.687.050	Keterbatasan SDM dalam pengawasan Sarana PIRT, petugas yang memiliki sertifikat DFI hanya 2 org dan memiliki tanggungjawab lain.	Memambah SDM dan membuat tim pengawasan sarana PIRT
			Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	dokumen	116.350.000	49.687.050		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN IRT			147.183.000	78.465.900	kelebihan SDM, uji sampel awalnya direncanakan di BPOM Padang tidak semua dapat dilaksanakan karena BPOM padang sudah over kapasitas dan untuk pengiriman sampel ke luar provinsi tdk	Perencanaan dan koordinasi.
			Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan sarana produksi makanan-minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang dilakukan pemeriksa post market dalam rangka	Produk	147.183.000	78.465.900		
V.			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.471.273.852	1.081.235.580		
			KEGIATAN ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PSM DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		488.981.782	431.257.690		
			Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat			488.981.782	431.257.690		
			KEGIATAN PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF DAN PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		105.131.594	83.814.200		
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			105.131.594	83.814.200		
			KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TK. DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen hasil pembinaan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		877.160.476	566.163.690		
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			877.160.476	566.163.690		

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Tujuan : terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan dalam rangka menunjang dan mendukung Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Anggaran Rp.100.673.647.594,-

Realisasi Rp. 95.514.867.673,- (94,69 %)

Adapun uraian hasil pelaksanaan kegiatannya adalah:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam hal ini adalah OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang kesehatan yang sinergis dan dinamis dalam rangka mendukung terwujudnya pencapaian visi dan misi yg tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan serta evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja pembangunan kesehatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada OPD Dinas Kesehatan dan 21 UPT Puskesmas serta jejaringnya. Kegiatan ini selama Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 242.958.544,- dengan realisasinya Rp.192.602.063,- atau 76,27 %, yang berisikan 4 (empat) sub kegiatan dengan realisasi kinerja (fisik) yaitu 100 %. Adapun hasilnya yaitu:

- 1) Tersedianya 8 dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Tersedianya 4 dokumen evaluasi kinerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Tersedianya 54 dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusutan dokumen RKA-SKPD
- 4) Tersedianya 54 dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusutan dokumen RKA-SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyediaan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas ASN di OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 69.152.564.897,- dengan realisasinya Rp. 66.897.712.011,- atau 96,74 % dan realisasi fisiknya sebesar 100 %. Hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

- 1) Tersedianya pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN dan Non ASN di lingkungan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Tersedianya pelayanan administrasi pelaksanaan tugas ASN Dinas Kesehatan dan 21 Puskesmas.
- 3) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun Dinas kesehatan
- 4) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

c. **Kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**

Kegiatan administrasi barang milik daerah milik daerah pada perangkat daerah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengamanan barang milik daerah dan penatausahaan barang milik daerah Dinas Kesehatan dan UPT dibawah Dinas Kesehatan yaitu 21 puskesmas dan 1 RSUD Tapan. Kegiatan ini didanai dengan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.107.770.001,- dengan realisasi Rp. 107.540.701,- (99,78 %), dengan pemcapaian kinerja realisasi fisiknya 100 %. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Tersedianya 23 dokumen pengamanan barang milik daerah
- 2) Tersedianya 30 dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada dinas Kesehatan,

d. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja perangkat daerah. Kegiatan ini pada tahun 2023 diberikan anggaran Rp. 46.704.916,- dengan realisasi Rp. 26.483.616,- (56,70 %), dengan realisasi fisik 83,33 %..Pencapaian kinerja ini adalah tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja perangkat daerah.

e. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan penyediaan administrasi umum perangkat daerah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan penunjang administrasi kegiatan administrasi umum perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini pada Tahun 2023 diberikan anggaran sebesar Rp662.625.097,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 541.100.116,- atau 81,66 % dengan pencapaian kinerja realisasi fisiknya yitu 100,00 %. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedianya bahan/komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 2) Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
- 3) Tersedianya bahan/barang cetakan dan penggandaan.
- 4) Tersedianya bahan logistik kantor yaitu bahan alat tulis kantor (ATK).
- 5) Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Tersedianya fasilitas makanan dan minuman dalam rangka kunjungan tamu.
- 7) Terselenggaranya operasional rapat-rapat koordinasi dan konsultasi OPD Dinas Kesehatan serta bahan-bahan untuk mendukung terselenggaranya rapat-rapat koordinasi.
- 8) Tertatanya arsip dinamis pada dinas Kesehatan.

f. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan prasarana kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung dan menunjang operasional administrasi kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 377.142.319,-. Adapun realisasi anggarannya selama Tahun 2023 yaitu Rp. 360.566.750,- atau 95,60 % sedangkan untuk evaluasi kinerja kegiatan atau realisasi fisik yaitu 100 %. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan peralatan kantor untuk dinas kesehatan dan Puskesmas Kayu Gadang Kecamatan Sutera.

g. **Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan kantor Dinas Kesehatan yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran Rp.462.737.450,- dengan realisasi anggarannya yaitu Rp. 414.402.168,- atau 89,55 % dengan realisasi fisiknya yaitu 100 %. Hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

- 1) Tersedianya pembayaran rekening air, listrik dan telepon termasuk biaya internet kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama 12 bulan Tahun 2023, instalasi listrik puskesmas 1 unit.
- 2) Tersedianya pembayaran jasa kebersihan dan pramu kantor OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinth Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan barang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2023 dengan alokasi anggaran Rp. 600.078.300,- dengan realisasi keuangannya Rp. 426.003.928,-- atau 70,99 % sedangkan realiasi fisik sebesar 95,22 % %. Kegiatan ini mempunyai sub kegiatan yaitu penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kantor, penyediaan jasa pajak kendaraan dinas dan operasional kantor Dinas Kesehatan dan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Dinas Kesehatan serta penyediaan jasa pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Uraian realisasi fisik kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,, pajak dan perizinan kendaraan dinas Jabatan yaitu kendaraan kepala dinas sebanyak 1 unit selama 12 bulan.
- 2) Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 16 unit selama 12 bulan.
- 3) Terlaksananya pemeliharaan dan service peralatan kantor seperti komputer, laptop, AC dan sarana kantor lainnya.
- 4) Terlaksananya pemeliharaan dan rehab bangunan gedung kantor.

i. Kegiatan Penataan Organisasi

Kegiatan ini bertujuan memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan kualitas pelayanan public dan tata laksana pada Dinas Kesehatan dan jajarannya dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.54.692.750,- dengan realisasi Rp. 50.213.994,- (91,81 %).Kegiatan ini realisasi fisiknya 100 % dengan tersedianya 12 dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana.

j. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan ini bertujuan menyediakan operasional untuk peningkatan layanan 20 Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan, karena dari 22 UPT (21 puskesmas dan 1 RSUD Tapan), yang melaksanakan Pola pelayanan Keuangan BLUD baru 20 Puskesmas.Anggaran BLUD Tahun 2023 Adalah Rp. 28.966.610.365,- dengan realisasi Rp. 26.313.066.046,35,- (90.84 %).

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan berbagai upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) di OPD Dinas

Kesehatan serta 21 Puskesmas jejaring dan 182 Nagari yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini mempunyai alokasi anggaran untuk Tahun 2023 yaitu Rp. 74.567.638.360,-,- dengan realisasi keuangan yaitu Rp. 55.923.081.702,- atau 75,00 %. Realisasi fisik program ini adalah 94,68 % dengan uraian per kegiatan dan sub kegiatannya yaitu:

a. **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana fasilitas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pelayanan kesehatan pada upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini selama Tahun 2023 yaitu Rp.25.129.525,- yang bersumber dari dana DAU , DAK Non Fisik (BOK) dan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2023 dengan realisasi keuangannya Rp. 22.518.774.333,-,- atau 87,38 % dan realisasi fisik kegiatan ini yaitu 88,6 % dengan uraiannya yaitu:

- 1) Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan 6 UNIT Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 7 unit
- 2) Tersedianya dana operasional untuk jasa tenaga Kesehatan, insentif piket di puskesmas, monitoring dan pembinaan ke puskesmas, pustu dan poskesri.
- 3) Terlaksananya pengadaan dan penyediaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar sebanyak 1 paket untuk 21 Puskesmas .
- 4) Terlaksananya pengadaan dan penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pada 21 Puskesmas.
- 5) Terlaksananya pendistribusian obat dan vaksin ke 21 Puskesmas.
- 6) Terlaksananya pengadaan alat-alat Kesehatan untuk puskesmas
- 7) Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala alat Kesehatan/alat penunjang medis fasilitas pelayanan Kesehatan
- 8) Tersedianya belanja operasional untuk RSUD Tapan

b. **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota**

Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar

bagi masyarakat baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan jejaringnya termasuk Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poskesri di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan ini pada Tahun 2023 mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 498547.134.837,- dengan sumbernya berasal dari DAU dan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2023 dengan realisasi keuangannya Rp. 33.206.760.158,- atau 68,40 %. Realisasi fisik kegiatan ini yaitu 92,50 % dengan uraiannya:

- 1) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui pembinaan dan pelaksanaan kelas ibu hamil pada 21 Puskesmas.
- 2) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin pada 21 Puskesmas termasuk pengelolaan jaminan persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil yang akan melaksanakan persalinan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
- 3) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir pada 21 Puskesmas.
- 4) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan anak balita pada 21 Puskesmas serta pembinaan dan pemantauan program kesehatan anak pada 21 Puskesmas.
- 5) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dan usia pra sekolah pada 21 Puskesmas dan pelaksanaan pembinaan sekolah sehat.
- 6) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif pada 21 Puskesmas melalui kegiatan pelaksanaan Posbindu PTM, screening kesehatan bagi usia produktif dan pelaksanaan Pandu PTM.
- 7) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut (Lansia) yaitu screening dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kesehatan lanjut usia pada 21 Puskesmas.
- 8) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Mellitus (DM), Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ), pelayanan kesehatan penderita Tuberculosis dan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko terinfeksi HIV melalui upaya pemeriksaan kesehatan berkala pada Posbindu PTM di 21 Puskesmas.

- 9) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk/masyarakat pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit pada 21 Puskesmas.
- 10) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk atau masyarakat terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana pada 21 Puskesmas.
- 11) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan upaya penurunan stunting bagi masyarakat di 21 Puskesmas.
- 12) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga termasuk pelaksanaan tes kebugaran bagi petugas Puskesmas pada 21 Puskesmas.
- 13) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat termasuk sertifikasi Nagari Stop BABS dan pengelolaan sampah dan limbah medis B3 pada 21 Puskesmas.
- 14) Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan dan edukasi pendidikan kesehatan bagi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media promosi kesehatan, termasuk pembinaan dan pelayanan PISPK pada 21 Puskesmas.
- 15) Terlaksananya pengelolaan kegiatan Promosi kesehatan pada 21 Puskesmas.
- 16) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan surveillance penyakit menular (P2M) dan penyakit tidak menular (PTM).
- 17) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) dan pelayanan kesehatan jiwa serta NAPZA pada 21 Puskesmas.
- 18) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan khusus yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Puskesmas dan pada Pos-Pos Kesehatan perbatasan daerah atau wilayah Pesisir Selatan, pelayanan kesehatan pada event-event daerah dan olahraga termasuk pelayanan kesehatan di Pos kesehatan akibat dampak bencana pada 21 Puskesmas.
- 19) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular pada 21 Puskesmas.

- 20) Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat pada 21 Puskesmas dan RSUD Tapan.
- 21) Terlaksananya pengelolaan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan sosialisasi akibat NAPZA di sekolah pada 21 Puskesmas.
- 22) Terlaksananya pengelolaan pelayanan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB ke laboratorium rujukan yaitu spesimen TB Paru.
- 23) Terlaksananya pengelolaan dan penyelenggaraan Kabupaten Sehat dengan pembentukan forum kabupaten sehat tingkat kecamatan pada 15 Kecamatan.
- 24) Terlaksananya pengelolaan pembinaan dan penilaian akreditasi Puskesmas, pada tahun 2023 dilaksanakan penilaian re akreditasi untuk 20 puskesmas, dan penilaian akreditasi pertama kali untuk RSUD Tapan dan Puskesmas kayu gadang.
- 25) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan kewaspadaan dini dan respon wabah penyakit pada 21 Puskesmas.
- 26) Terlaksananya Operasional pelayanan 21 Puskesmas.

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Kegiatan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi merupakan kegiatan penunjang OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2023 yang bertujuan untuk terpenuhinya sistem pencatatan dan pelaporan secara terpadu dalam suatu sistem informasi kesehatan secara terintegrasi dari 21 Puskesmas, RSUD Tapan dan Dinas Kesehatan serta jejaringnya. Kegiatan ini alokasi anggarannya Rp. 114.925.144,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 109.807.211,- atau 95,55 %. Adapun realisasi fisiknya yaitu 100 % dengan hasilnya yaitu terlaksananya pengelolaan sistem pencatatan dan pelaporan dalam sistem informasi kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan jejaringnya yang menghasilkan dokumen Profil pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

d. **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pertama (FKTP) dan jejaringnya dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) serta menyiapkan rumusan pelayanan kesehatan rujukan. Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Tahun 2023 adalah Rp. 133.460.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 87.740.000,- atau 65,74 %. Realisasi fisik kegiatan ini adalah 83,33 % dengan uraiannya:

- 1) Terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi (Monev) serta bimbingan teknis peningkatan upaya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poskesri serta jejaringnya pada 21 Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Terlaksananya pembinaan dan pemantauan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan bagi 21 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Terlaksananya upaya pembinaan dalam rangka menurunkan angka rujukan kasus penderita dari Puskesmas ke Rumah Sakit Rujukan, sehingga pelayanan kesehatan masih bisa di laksanakan di FKTP Puskesmas.

III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan termasuk program prioritas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan yng optimal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM Kesehatan pada 21 Puskesmas, RSUD Tapan dan Dins Kesehatan sesuai dengan tuntutan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 dan pencapaian RENSTRA Dinas Kesehatan.

Program ini alokasi anggaranya Rp. 4.013.360.679,- dengan realisasinya Rp. 1.531.871.564,- atau 38,17 % sedangkan realisasi fisiknya yaitu 79,49 %. Realisasi di program ini tidak maksimal karena dana BOK Puskesmas tidak salur seluruhnya ke puskesmas, karena persyaratan untuk penyaluran tahap III tidak dapat dipenuhi oleh puskesmas. Adapun uraian hasil pelaksanaan kegiatannya yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk

UKP dan UKM di wilayah kabupaten/Kota

Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan untuk UKP dan UKM merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan SDM kesehatan dalam rangka menunjang program dan kegiatan UKP dan UKM. Anggaran pelaksanaan kegiatan ini pada Tahun 2023 adalah Rp.2.118.673.890,- dan realisasi keuangannya yaitu Rp. 278.531.775,- atau 12,34 % dan realisasi fisiknya yaitu 70,02% dengan uraian hasilnya yaitu:

- 1) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan pada 21 Puskesmas oleh Dinas Kesehatan.
 - 2) Untuk Dana DAK Nonfisik (BOK) sebanyak 12 Puskesmas , tidak terealisasi, karena tidak memenuhi persyaratan untuk penyaluran tahap III dari Kemenkes .
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh tenaga Kesehatan sebagai sumber daya manusia Kesehatan yang bertugas di Puskesmas- Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskersi serta RSUD Tapan agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran untuk kegiatan ini tersedia Rp.139.321.000,- dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 24.185.000,- ((17,36 %) dan realisasi fisik 75 %).
- c. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

IV Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman

Program sediaan farmasi, alat kesehatan serta makanan dan minuman ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi termasuk obat bahan medis pakai (BMHP), peralatan kesehatan di Puskesmas serta bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam segi kualitas dan keamanan makanan dan minuman. Alokasi anggaran program ini adalah Rp. 350.127.250,- dengan realisasi keuangannya Rp. 161.941.250,- atau 46,14% dan realisasi fisiknya yaitu 91,67 % dengan uraian hasilnya:

- a. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro tradisional (UMOT) di 15 Kecamatan dengan fokusnyanya adalah pasar, toko obat dan apotek serta usaha UMKM dalam bentuk olahan makanan dan minuman pada

masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Terlaksananya penyuluhan kesehatan industri pangan terhadap pemilik pengusaha industri rumah tangga (PIRT) di 15 Kecamatan.
- c. Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian sampel bahan dan makanan dan minuman pada wilayah 15 Kecamatan.
- d. Terlaksananya pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian yaitu toko obat dan apotek di 15 Kecamatan.
- e. Terlaksananya Post market apda produk-produk makanan-minuman IRT yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.

V **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, sedangkan tujuan pelaksanaan progra ini adalah terpenuhinya kebutuhan penyuluhan baik langsung maupun melalui media termasuk sosialisasi terhadap program-program dan kegiatan dibidang kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 mempunyai alokasi anggaran Rp. 1.471.275.852,- adapun realisasi keuangan Rp. 1.081.235.580,- atau 73,49 % dan realisasi fisiknya yaitu 99,46 % dengan uraian hasil pelaksanaan kegiatannya yaitu:

a. **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan advokasi, pemberdayaan dan kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan masyarakat di 21 Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran Rp. 488.981.782,- dengan realisasi anggarannya Rp. 431.2257.690,- (88,20dan realisasi fisiknya 98,91 % dengan uraian hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi (Monev) Nagari Siaga pada 21 Puskesmas, terlaksananya monitoring dan evaluasi (monev) survey PHBS pada 21 Puskesmas, dan terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan pada 21 Puskesmas.

- b. Kegiatan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah kabupaten/kota

Kegiatan ini bertujuan dalam rangka penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup sehat terhadap seluruh Masyarakat, melakukan pembinaan ke puskesmas untuk selalu melakukan promosi Gerakan hidup bersih dan sehat serta mencegah penyebaran penyakit baik secara langsung maupun melalui leaflet, brosur dan lain-lain. Anggaran utk kegiatan ini adalah Rp. 105.131.594,- , realisasi sebesar Rp.83.814.200,- dengan realisasi fisik 100 %.

- c. Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tk. daerah kabupaten/kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas. anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.877.160.476,-, dengan realisasi Rp.566.163.690,- (64,55 %). Anggaran ini adalah untuk Dinas Kesehatan dan 21 Puskesmas yang bersumber dari DAK Non Fisik, yang pencairannya tidak maksimal, yang disebabkan oleh keterlambatan juknis dari Kemenkes dan penyaluran dana Dak Non fisik yang tidak 100 %, karena syarat penyaluran tidak terpenuhi oleh Puskesmas.

2.2 Kebijakan Strategis

Tabel 2.2.

Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	A (86)	A(86,16)	100,19
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	140/100.000 KH	138/100.000 KH	101,45
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12/1.000 KH	11/1.000 KH	109,09
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	11,20%	7,00%	155,34
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	100	91	91,00
Total					111,41

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk Nilai AKIP Dinas Kesehatan capaian kinerjanya 100,19 % , dari target kinerja A (86) dapat direalisasikan dengan nilai A (86,16) yaitu melebihi dari target yang ditetapkan. Nilai tersebut merupakan hasil dari Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI), terjadi penurunan jumlah kematian ibu dari tahun 2022 yaitu dari 12 orang ibu yang mati menjadi 11 orang pada tahun 2023. Secara angka kematian dari target 140/100.000 Kelahiran Hidup, realisasi tahun 2023 adalah 138/100.000 Kelahiran Hidup (KH). Target dari indikator kinerja ini adalah penurunan angka kematian ibu, sehingga dapat dilihat dari tabel diatas, target kinerja AKI dapat dicapai.

Angka Kematian Bayi (AKI) tahun 2023 dari target 12/1.000 kelahiran Hidup (KH), realisasinya adalah 11/1.000 H. Untuk Angka Kematian Bayi ini walaupun secara realisasi memang dibawah target atau kinerja dapat tercapai. Tapi kalau dibandingkan dari tahun 2022, terjadi peningkatan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu dari 9/1.000 KH di tahun 2022, meningkat menjadi 11/1.000 KH pada tahun 2023 atau secara jumlah pada tahun 2022 jumlah bayi yang mati adalah sebanyak 75 orang yang meningkat ditahun 2023 menjadi 90 orang. Hal ini disebabkan salah satunya adalah dokter spesialis anak yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 hanya ada 1 orang dan factor-faktor lainnya.

Prevalensi stunting (EPPGBM) tahun 2023 dengan target indikator kinerja 11,20 % , realisasi dengan angka 7,00 %. Realisasi ini sama dengan tahun 2022 dengan yaitu 7.00%. Diharapkan angka prevalensi stunting akan dapat terus ditekan pada tahun 2024.

Pada indikator kinerja kematangan nilai inovasi dinas dapat direalisasikan dengan angka 91 % dari target 100 %. Hal ini disebabkan ada beberapa syarat yang tidak diinputkan di aplikasi sebagai syarat penilaian dari kinerja ini.

Selain dari Perjanjian Kinerja, kebijakan -kebijakan yang dilakukan untuk penyelesaian masalah antara lain :

No.	Kebijakan strategis	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	melakukan Rehabilitasi terhadap Puskesmas dan Pustu dan juga peralatan medisnya.	pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang baik sesuai dengan standar Kesehatan nasional di setiap puskesmas yang ada
2.	Inovasi "RANG PASISIE" yaitu Rangkul dan Angkut Pasien-Pasien Emergensi dengan biaya secara gratis kepada Masyarakat yang membutuhkan	meningkatkan kemudahan mengakses fasilitas Kesehatan
3.	Delapan Aksi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi	Aksi #1 Melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.

<p>Kabupaten/ Kota yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</p>	<p>Aksi #2 Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi,</p> <p>Aksi #3 Menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota ,</p> <p>Aksi #4 Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.</p> <p>Aksi #5 Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.</p> <p>Aksi #6 Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi ditingkat kabupaten/kota.</p> <p>Aksi #7 Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota,</p> <p>Aksi #8 Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.</p>
--	--

2.3. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 .

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Agar Dinas Kesehatan melakukan penempatan aparatur atau pejabat di Puskesmas dengan memperhatikan kapasitas dan kapabilitas aparatur sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan dapat optimal. Termasuk jajaran RSUD dr.M.Zein Painan	Sudah dilaksanakan penempatan aparatur sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Untuk tertib pelayanan dan meminimalkan masalah terhadap pelayanan pasien bermasalah di RSUD dr.M.Zein Painan agar jajaran RSUD dr.M.Zein Painan menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pasien bermaslah	Sudah dibuat SOP terhadap pasien bermasalah oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kanror Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Perlu dilakukan penambahan Puskesmas Pembantu (PUSTU) di daerah Punggasan, Lagan, dan Sungai Tunu. Agar dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang baik terhadap Masyarakat-masyarakat yang berdomisili dari Puskesmas Linggo Sari Baganti dan Puskesmas Ranah Pesisir .	Untuk Penambahan PUSTU, perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, untuk saat ini lebih difokuskan kepada merehabilitasi Pustu-Pustu yang rusak dan upaya untuk melengkapi peralatan dan kebutuhan pustu dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.
4.	Diharapkan agar inovasi "PASAN MANDE" dari Dinas Kesehatan dapat disosialisasikan dan diterapkan dengan baik pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Pesisir	Inovasi "PASAN MANDE" sudah disosialisasikan secara berulang kepada seluruh puskesmas dan sudah diterapkan.

	Selatan.	
5.	Perlu dilakukan evaluasi oleh Dinas Kesehatan terhadap Honor, jasa Pelayanan, dan uang jaga malam di Puskesmas yang terlalu kecil untuk meningkatkan profesionalitas kerja dan motivasi kerja.	Pembayaran honor sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum (SBU)
6.	Diharapkan Dinas Kesehatan Proaktif dan selalu mengusulkan formasi PPPK untuk Tenaga Honorer Nakes setiap tahunnya. Karena MENPAN-RB sudah memberikan kuota formasi yang sudah dimulai sejak tahun 2021,2022, dan 2023. Harapan bagi Tenaga Kesehatan yang honores satu-satunya adalah ASN PPPK, kalau sekiranya Dinas Kesehatan tidak mengusulkan formasi alangkah kecewanya honorer Nakes karena mereka sudah ada yang mengabdikan puluhan tahun.	Pada tahun 2023, sudah dilakukan perekrutan PPPK untuk tenaga honorer Nakes Kesehatan

BAB III

CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 3.1** Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan.
- 3.2** Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada tingkatan Pemerintahan Tingkat di bawahnya
Tidak ada indentifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan Tingkat di bawah Dinas Kesehatan, karena tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023 (LKPj) Bidang Kesehatan pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kesehatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal yang merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPj ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Bidang Pembangunan Kesehatan Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah bidang kesehatan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.